

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH

Nur Khulailatul Hurriyah\*<sup>1</sup>, Ihsan Zikri Ulfiandi\*<sup>2</sup>, Tri Agung Yoga P.\*<sup>3</sup>, Habiburrahman\*<sup>4</sup>

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

\*<sup>1</sup>[khulahurriyah@gmail.com](mailto:khulahurriyah@gmail.com), \*<sup>2</sup>[ihsanzikri@gmail.com](mailto:ihsanzikri@gmail.com), \*<sup>3</sup>[triagungyoga@gmail.com](mailto:triagungyoga@gmail.com),

\*<sup>4</sup>[rahmanmei196@gmail.com](mailto:rahmanmei196@gmail.com)

**Abstract.** *Schools are social institutions that cannot be separated from their community, on the other hand, society cannot be separated from schools. Because they both have interests. Schools as formal institutions entrusted with the mandate to educate, train and guide the nation's children (community), while the community is a stakeholder or user of educational services. The success of education is not only determined by the educational process in schools and the availability of facilities and infrastructure, but is also determined by the role of the family and community. Because education is a shared responsibility of schools, families and communities. So the community has a role to think about the implementation of education and participate in providing supervision in related schools. High community participation in schools is an indicator that school management is running well. When schools are side by side with both the community and parents, it will have a big impact on the progress of the school and will have a big influence on improving the quality in schools. Efforts to involve the community in improving the quality of education in schools can be taken by (1) conducting outreach to stakeholders, including school committees. (2) Involve formal leaders outside the school to participate in owning the school, because the progress and decline of educational institutions will also have an impact on the local community. (3) Showing the program directly, in addition to educating children, it can also show the achievements that have been achieved by students, teachers or school achievements as a whole.*

**Keywords:** *Community participation, stakeholders, quality of education*

**Abstrak.** Sekolah/madrasah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakatnya, sebaliknya masyarakatpun tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Karena keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Sekolah sebagai lembaga formal yang diserahi amanat untuk mendidik, melatih dan membimbing anak bangsa (masyarakat), sementara masyarakat adalah stakeholder atau pengguna jasa pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja melainkan juga ditentukan oleh peran keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan ialah tanggung jawab bersama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Maka masyarakat mempunyai peran untuk turut memikirkan penyelenggaraan pendidikan serta turut berpartisipasi dalam memberikan supervisi di sekolah/madrasah terkait. Partisipasi masyarakat yang tinggi di sekolah menjadi indikator bahwa manajemen sekolah berjalan dengan baik. Ketika sekolah berdampingan baik dengan masyarakat dan orang tua akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah serta akan memberi pengaruh yang besar bagi peningkatan mutu di sekolah. Upaya melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dapat ditempuh dengan cara (1) melakukan sosialisasi kepada para stakeholder, termasuk komite madrasah. (2) Melibatkan para pemimpin formal diluar madrasah untuk ikut serta memiliki madrasah, sebab maju mundurnya lembaga pendidikan akan berdampak pula pada masyarakat setempat. (3) Menunjukkan program secara langsung, selain mendidik anak-anak dapat pula menunjukkan prestasi yang telah dicapai baik oleh siswa, guru ataupun prestasi sekolah secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Partisipasi masyarakat, stakeholder, mutu pendidikan.

### A. PENDAHULUAN

Supervisi atau pengawasan dalam lembaga pendidikan berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu

pendidikan di negara lain. Dari data *United Nations Development Programme* (UNDP) bahwa Human Development Indeks (HDI) tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 107 dari 189 Negara. Pada peringkat ini, nilai HDI yang dicatatkan adalah 0,718; dengan tingkat harapan hidup 71,7; jumlah tahun pendidikan yang diharapkan 13,6; rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh 8,2; dan pendapatan per kapita 11.459. Meskipun oleh UNDP Indonesia baru saja dikelompokkan menjadi negara dengan HDI tinggi; walaupun tidak ada peningkatan dalam ranking; tetap saja kondisi ini patut menjadi perhatian kita, karena kita masih tertinggal dengan beberapa negara sahabat.

Atas dasar berbagai keprihatinan terhadap kondisi dunia pendidikan, utamanya terhadap supervisi, pengelolaan pendidikan yang sebagian besar masih konvensional sangat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu lembaga pendidikan menghasilkan pebelajar dengan hasil belajar yang baik, hasil belajar yang biasa dan hasil belajar tergolong kurang baik. Kalau kita telaah keberadaan lembaga pendidikan di Indonesia baik dibawah Dinas Pendidikan maupun Mapenda Kemenag mengalami penurunan mutu disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah: pertama supervisi pendidikan tidak dilaksanakan secara profesional, terkendala pemahaman dan pelaksanaan supervisi yang masih kaku dan sebatas formalitas, yaitu masih ada jarak antara supervisor dengan guru. Kedua, belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama di lembaga pendidikan yang terletak di daerah, khususnya daerah terpencil.

Dalam menghadapi berbagai macam problematika dunia pendidikan, lembaga pendidikan sejatinya dapat memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dan pendidikan memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan berbangsa ini. Masyarakat adalah sekelompok warga negara Indonesia selain pemerintah yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat juga bisa dikatakan sekelompok manusia yang hidup saling berdampingan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling bertalian dalam kehidupan baik sosial, religi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Masyarakat merupakan pengguna utama lulusan pendidikan. Semakin baik orang yang berpendidikan dikalangan masyarakat tersebut maka semakin baik pula tatanan kehidupan dalam masyarakat itu. Peran penting pendidikan dalam pengembangan masyarakat juga tidak bisa dinomor duakan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat sangat berperan terhadap pendidikan yang ada dilingkungannya. Sehingga antara masyarakat dengan lembaga pendidikan memiliki hubungan yang erat sebagai kesatuan yang harus saling berkerjasama dengan baik, kooperatif, dan interaktif.

Pemberdayaan Masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan bentuk kepedulian lembaga pendidikan kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat memiliki arti untuk membangun masyarakat supaya mereka siap bersaing dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang dialami dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat ini perlu diterapkan dengan sebab pada dasarnya masyarakat mempunyai kebutuhan, keinginan, dan kemampuan untuk berkembang sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan dengan keadaan dan kebutuhan yang menjadi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam pendidikan berbasis masyarakat ini menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maksudnya lembaga pendidikan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kerjasama harus berjalan dengan baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga bisa menjadi kesatuan yang saling menguatkan.

Berangkat dari fenomena dan kenyataan diatas, sudah seharusnya sebagai praktisi pendidikan, berjuang keras memerangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan. Dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat ini, sekolah bertumpu pada masyarakat, dengan maksud sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, mengandalkan kekuatan yang dimiliki masyarakat, dimiliki oleh masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan pengolaannya berada ditangan masyarakat. Sekolah yang bertumpu pada masyarakat ini mengarah

pada kemandirian masyarakat dalam mengelolanya, agar mutu pendidikan dapat diraih sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari sinilah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik merupakan metode penelitian yang menekankan pada usaha untuk memperoleh informasi mengenai status atau gejala pada saat penelitian, memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, juga lebih jauh menerangkan hubungan, serta menarik makna dari suatu masalah yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di MTs NU Pakis yang beralamat di Jl. Raya Bunut Wetan No.986, Krajan, Bunut Wetan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Pendidikan dengan Kebutuhan Masyarakat

Ada beberapa kecenderungan yang menyebabkan semakin dirasakan perlu adanya keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat, diantaranya menurut Lili, dkk (2005) adalah:

- a. Semakin tingginya tuntutan dunia kerja yang sejalan dengan tuntutan pembangunan, baik secara kualitas dan kuantitas.
- b. Perubahan struktur dan persyaratan dunia kerja yang semakin kompetitif.
- c. Kecenderungan umum dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya perubahan secara berfikir yang memandang bahwa pendidikan semestinya menyiapkan peserta didik yang utuh, menyangkut pengetahuan, sikap, dan kemauan.
- d. Pendidikan dipandang sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul.

Keterlibatan masyarakat terhadap sekolah pada setiap jenjang pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Sekolah dasar, masyarakat dilibatkan dalam mengisi muatan lokal mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan penilaian.
- b. Sekolah lanjutan tingkat pertama, masyarakat juga dilibatkan dalam mengisi muatan lokal, dengan lebih menekankan pada kegiatan yang dapat membekali peserta didik dalam mengenal potensi dan peluang yang tersedia dilingkungan sekolahnya.
- c. Sekolah menengah atas, masyarakat dilibatkan dalam mengisi muatan lokal, para siswa dimungkinkan melakukan praktek lapangan sesuai minat dan kebutuhannya.
- d. Sekolah menengah kejuruan, masyarakat dilibatkan dalam menciptakan *link and match* dilakukan lebih nyata sesuai dengan tujuan institusionalnya.
- e. Perguruan tinggi, keterlibatan masyarakat dilakukan melalui kerjasama riset dan pengembangan potensi daerah dalam bidang ekonomi maupun industri.

Jalur pendidikan luar sekolah, masyarakat dilibatkan dalam menciptakan *link and match* lebih memperkuat dan mengarahkan apa yang telah ada, melalui bimbingan, bantuan, dan kemudahan dalam mendapatkan izin.

## **2. Hubungan Masyarakat dalam Mutu Pendidikan**

### **a. Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dalam konsep yang luas memiliki makna suatu kadar proses dan hasil dari pendidikan secara komprehensif yang kemudian ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan karakteristik tertentu. Dalam dunia pendidikan, mutu meliputi; input; proses; dan output pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang system penjaminan mutu pendidikan pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa mutu pendidikan ialah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Dzujak Ahmad mengungkapkan mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standart yang berlaku (Dzujak Ahmad, 1996).

Sedangkan Sudarwan Danim memiliki pandangan lain tentang pengertian mutu. Menurutny mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi dan, ketekunan dan cita-cita.

Dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang berkualitas jika mampu melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu (Danim, 2008,).

### **b. Hubungan Masyarakat dalam Mutu Pendidikan**

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung meningkatnya mutu suatu pendidikan. Sekolah ataupun madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan tidaklah mungkin berdiri secara mandiri, ada komponen-komponen lain sebagai penyangga berdirinya institusi tersebut, diantaranya adalah masyarakat.

Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan berkaitan erat dengan transmisi atau penyalur ilmu pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Kelakuan manusia hakikatnya hampir keseluruhannya bersifat sosial, yakni yang dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya, Sesuatunya yang kita pelajari merupakan hasil hubungan dengan orang lain di rumah, sekolah, tempat bermain, tempat bekerja, dan sebagainya. Bahan pelajaran atau isi dari pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat.

Suatu kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar dalam masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka setiap anggotanya terlebih anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan lainnya yang harus dimiliki setiap anggota itu. Setiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan dan melalui interaksi sosial didalamnya. Demikian dapat dikatakan pendidikan sebagai sosialisasi.

Pendidikan disini dimulai dari interaksi pertama setiap individu dengan anggota masyarakat lainnya. Misalnya: Pada saat bayi dibiasakan untuk minum menurut waktu tertentu. Disini tidak ada perbedaan antara orang tua dengan anak, ataupun guru dengan murid, karena yang diutamakan adalah hubungan yang erat antar individu dengan masyarakat. Belajar sendiri adalah

sosialisasi yang terus-menerus secara kontinu. Setiap individu ada kalanya dapat menjadi murid dan guru. Individu belajar dari lingkungan sosial dan mengajar serta mempengaruhi orang lain.

Orang yang berpendidikan adalah mereka yang telah bersekolah. Dalam sistem pendidikan yakni sekolah sebagai lembaga sosial yang mana individu dapat berproses secara sosial agar menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, karena didalamnya ada pendidikan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Adanya aspek kelakuan yang ada di masyarakat dapat disebut juga kebudayaan masyarakat yang akan membentuk pribadi individu bertalian erat dengan kebudayaan lingkungan tempat hidup.

Kebutuhan pendidikan di sekolah dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional antarkeduanya, yakni:

- 1) Adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang selaras dan positif terhadap sekolah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat
- 2) Ketepatan sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga pra-sekolah akan ditentukan oleh kejelasan perumusan komitmen antara sekolah selaku pelayanan dengan masyarakat selaku pemesan

Peningkatan pengaruh dan juga kualitas lembaga pendidikan perlu dukungan dari para stakeholder, meliputi pemerintah daerah, komite sekolah, orang tua siswa, para pemerhati pendidikan, dan juga para siswa. Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom serta peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakannya sendiri. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat secara konseptual mengacu pada tren yang memunculkan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Tilaar bertujuan untuk mengembangkan social capital yang akan menghasilkan sikap demokratis serta pengembangan capital intellectual suatu bangsa (Tilaar, 2002). Lebih jauh, pendidikan berbasis masyarakat ini sejalan dengan hakikat otonomi itu sendiri yang bertujuan untuk memunculkan sikap mandiri pada individu, lembaga, atau daerah (Tilaar, 2000). Dan untuk mengembalikan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kemandirian, usaha-usaha yang harus dilakukan adalah upaya-upaya pemberdayaan (*empowerment*) yang di dalamnya terlibat empat komponen inti, yaitu:

- 1) Masyarakat lokal;
- 2) Universitas di daerah;
- 3) Lembaga pemerintah di daerah; dan
- 4) Lembaga pendidikan

Ketika kebijakan otonomi daerah yang diikuti oleh otonomi pendidikan digulirkan dan belum mendapat respons yang antusias dari masyarakat, maka perlu penelusuran yang serius tentang hal tersebut. Ali Imron menjelaskan beberapa faktor penyebab keengganan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam sebuah kebijakan:

- 1) Kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- 2) Kurang mengikatnya kebijakan tersebut pada masyarakat. Kebijakan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas bahkan bisa menjadi penyebab yang menerima sanksi dianggap mempunyai cacat sosial. Sedangkan kebijakan yang tidak demikian mengikat umumnya tidak demikian dipatuhi dan tidak menjadikan penyebab cacat sosial bagi pelanggarnya.
- 3) Adanya ketidakpastian hukum baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun bagi mereka yang tidak berpartisipasi.

- 4) Kebijakan tersebut terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis. Hal demikian bisa menjadikan penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena masyarakat tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil
- 5) Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari untung secara cepat. Padahal, keuntungan tersebut baru didapat, jika ia melanggar ketentuan yang berlaku dalam kebijaksanaan. Anggota masyarakat demikian cenderung tidak mau berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang digulirkan.
- 6) Rumusan kebijakan tidak jelas dan mungkin antara rumusan satu dengan yang lainnya kelihatan bertentangan. Ini menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi, lebih-lebih partisipasi aktif yang dilandasi oleh kesadaran yang dalam (Ali Imron, 2008).

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan tidak hanya didasari oleh pijakan filosofis-sosiologis, akan tetapi juga dilandasi oleh pijakan yuridis. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengamatkan pemberdayaan dan penciptaan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Sinar Grafika, 1999). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan tidak terbatas pada satu sektor saja, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk pembangunan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan otonomi pendidikan, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan menjadi salah satu tujuan akhir yang hendak dicapai dalam otonomi pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Toto Cholik Motohir dan Ismet Basuki, 2001) pelaksanaan otonomi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan empat hal:

- 1) Peningkatan mutu
- 2) Peningkatan efisiensi
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat
- 4) Peningkatan pemerataan pendidikan.

### **3. Supervisi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama' Pakis (MTs NU Pakis) didirikan pada tahun 1967 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Menengah (MIM) yang diprakarsai oleh para ulama', tokoh masyarakat dan para guru MINU Bunut Wetan I (sekarang MI Al Hidayat) dengan ciri khas keislaman ala Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Tujuan dari pendirian MIM adalah agar sebagian besar alumnus MINU Bunut Wetan I yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan kurangnya biaya dapat melanjutkan pendidikannya. Dua tahun kemudian nama Madrasah Ibtidaiyah Menengah (MIM) diganti dengan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama' Pakis (MTs NU Pakis). Kemudian di tahun 1973 berdirilah TK Muslimat NU 04 Al Hidayat, juga karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Baik TKM NU 04, MI Al Hidayat maupun MTs NU Pakis, ketiganya berada dibawah yayasan yang sama yakni yayasan Al Hidayat.

Menurut Dr. Najmah, M.Pd dalam keterangannya menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat diantaranya dibuktikan dengan: 1) Dukungan pembiayaan oleh wali siswa 2) Penyediaan lahan untuk pembangunan gedung baru oleh masyarakat 3) Penguatan kearifan lokal melalui kegiatan Kuliah Umum Profesi yang diisi oleh wali siswa dengan latar belakang profesi yang berbeda beda.

Permasalahan dalam pendidikan tidak mungkin diatasi hanya oleh pemerintah dan atau lembaga persekolahan. Peran serta aktif dari masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan pendidikan inklusif dan pelaksanaan program-

program pendidikan. Partisipasi masyarakat hendaknya tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan (Mukhlisah, 2002).

Meskipun proses belajar mengajar terjadi di sekolah tetapi hasil yang ingin dicapai dipenuhi oleh berbagai faktor, antara lain peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan karena termarginalkan dalam system penyelenggaraan pendidikan. Marginalisasi partisipasi masyarakat terlihat pada peran yang sangat terbatas hanya BP3 saja, sekedar pada bantuan dana pendidikan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Akibatnya masyarakat apatis dan tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pendidikan (Departemen Agama RI, 2005).

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.39/1992 pasal 4 dan dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan salah satu diantaranya yaitu: Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dapat melibatkan diri dalam: membantu (1) merencanakan (*planning*), (2) mengorganisasikan (*organizing*), (3) mengarahkan (*directing*), (4) mengkoordinasikan (*coordinating*), (5) mengawasi (*controlling*), dan (6) mengevaluasi (*evaluation*), penyelenggaraan sekolah-sekolah (Id Sidi, 2001).

Supervisi ialah salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi dengan menilik serta menilai terhadap kinerja pendidik dan tenaga pendidikan dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Secara etimologi, supervisi diambil dari bahasa inggris "supervision" artinya pengawasan dibidang pendidikan. Maka, dalam hal ini masyarakat juga memiliki peran penting didalamnya, yang tidak lain ditujukan sebagai bentuk pengembangan pendidikan di sekolah/madrasah terkait (Jerry H. Makawimbang, 2011).

Pelaksanaan supervisi dapat mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Sehubungan dengan ini, tidak dapat diasumsikan secara sempit, bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan pembelajaran (Indah, 2010)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin maju SDM pada daerah tersebut dan sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin mundur pula SDM pada daerah tersebut (Henni Sukmawati, 2018).

Kepala sekolah harus berupaya sebesar-besarnya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan otoritas yang dimilikinya sangatlah mungkin terbangun suatu pola keikutsertaan masyarakat secara intensif dalam berbagai aktivitas kependidikan. Bagi pengawas, kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat (Henni Sukmawati, 2018), dapat dilihat antara lain:

- a. Keberadaan sekolah/madrasah cukup dikenal lingkungan dan masyarakat.
- b. Terjalin ikatan emosional antara sekolah/ madrasah dengan masyarakat.
- c. Masyarakat merasa bagian dari sekolah/ madrasah.
- d. Pelibatan masyarakat tidak hanya sebatas BP3 saja.
- e. Adanya pertanggungjawaban kepala sekolah/ madrasah secara berkala kepada masyarakat.

Berbicara supervisi, Wilem Mantja dalam Jerry (Jerry H. Makawimbang, 2011), menjelaskan bahwa supervisi sebagai kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar, memiliki dua tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi itu sendiri, yaitu perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Mutu adalah suatu nilai atau keadaan, namun secara bahasa mutu memiliki kesamaan arti dengan kata kualitas, derajat dan tingkat. Dalam bahasa Inggris mutu dikenal dengan *quality* yang berarti mutu dapat dikatakan ukuran baik buruk suatu benda, keadaan taraf atau derajat. Dalam konsep pendidikan “mutu pendidikan” diartikan kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional terhadap komponen-komponen pendidikan sehingga memberi nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut standar yang berlaku. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu berdasarkan karakteristiknya, diperlukan partisipasi masyarakat dan keterbukaan pengelola pendidikan di sekolah untuk bersama-sama merespon program pendidikan yang akan dilakukan oleh sekolah.

Dalam salah satu penelitian menyebutkan bahwa kontribusi komite sekolah yang termasuk didalamnya masyarakat, dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat tinggi. Kontribusi komite sekolah tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan melalui; (1) Pemberian pertimbangan untuk kepala sekolah dan stakeholder, (2) Pemberian dukungan kepada kepala sekolah, (3) Komite sekolah melakukan kontrol dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, (4) Komite sekolah sebagai mediator dalam membina kerja sama yang harmonis dengan seluruh komponen pendidikan (Basith, 2020).

Dalam memberdayakan masyarakat, pihak sekolah dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan komite sekolah/madrasah. Kepala sekolah yang profesional memiliki kemampuan kuat dalam memperdayakan Komite Sekolah/Madrasah. Kehadiran Komite sekolah/madrasah merupakan wujud nyata untuk mewadahi partisipasi masyarakat. Kepala sekolah sebagai administrator sangat berkepentingan dengan kehadiran komite sekolah/madrasah, karena melalui merekalah partisipasi masyarakat dapat dioptimasi. Pemerintah dan masyarakat harus mampu berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, baik dalam kerangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Pada tataran prakarsa masyarakat, tugas-tugas semacam ini mestinya dimotori secara intensif dan ekstensif oleh Komite Sekolah/ Madrasah (Danim, 2010).

#### **D. KESIMPULAN**

Persoalan mutu di madrasah merupakan permasalahan yang paling serius dan paling kompleks. Rata-rata, lembaga pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, supervisi, metode, pendekatan, strategi, dan kebijakan. Untuk meningkatkan mutu madrasah harus menjadi perhatian utama semua pihak, agar lembaga pendidikan Islam dapat eksis dan solid serta hidup berkelanjutan dalam era global dan memiliki daya saing. Salah satunya adalah melalui supervisi pemberdayaan masyarakat. Masalah mutu madrasah merupakan kebutuhan yang harus disampaikan, dirasakan dan dikerjakan oleh para, siswa, guru, ustadz, orang tua, masyarakat, dan para stakeholders. Dalam rangka meningkatkan mutu madrasah peran supervisi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diabaikan. Mengingat masyarakat adalah salah satu komponen penting dalam proses pendidikan anak. Supervisi pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk pemberdayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan untuk ikut serta melakukan supervisi terhadap proses pendidikan di madrasah terkait, yang bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan kerjasama yang baik dan solid sehingga terjalinnya hubungan mutualisme yang kuat dan saling menguatkan.



## REFERENSI

- Dzaujak, Ahmad. (1996). *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud.
- Baridi, Lili., Muhammad Zein, M. Hudri. (2005). *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: CED.
- Basith, Abdul dan Indriana Rahmawati. (2020). Kontribusi Kinerja Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan. *J-MPI, Vol. 5 No. 1*.
- Danim S. (2008). *Visi Baru Manajemen Berbasis Sekolah; Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, S. (2010). *Profesi Kependidikan*. Alfabeta.
- Departemen Agama RI. (2005). *Standar Supervisi Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah*.
- H.A.R Tilaar. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.A.R. Tilaar. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henni Sukmawati. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah*, 4(1), 77.
- Id Sidi. (2001). *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Radar Jaya Offset.
- Imron Ali. (2008). *Kebijakan-sanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk, Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jerry H. Makawimbang. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Mujtahid. (2012). Konsep, Karakteristik, dan Rasional Supervisi Pengajaran dalam Tinjauan Analisis SWOT. *Jurnal el-Hikmah*.
- Mukhlisah. (2002). *Mendesak Pendidikan Berbasis Komunitas*. Pikiran Rakyat Cyber Media.
- Rosmedi., Riza Risyanti. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.
- Zuhriyah, Indah Aminatuz. (2010). Implementasi Pendekatan Supervisi Pembelajaran Direktif dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di MI/SD, *Jurnal Madrasah, Vol. 3 No. 1*.